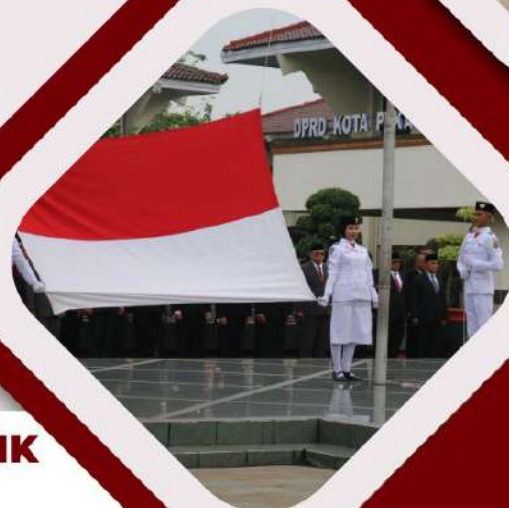




RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. MAJAPAHIT NO. 20 KOTA PEKALONGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah- Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ini.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026.

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pekalongan



M. TAUFIQUEER CHMAN, S.STP., MM
NIP. 19780107 199703 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
I.1. Latar Belakang.....	3
I.2. Landasan Hukum	7
I.3. Maksud dan Tujuan.....	8
I.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	25
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
III.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KepMendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi,

perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

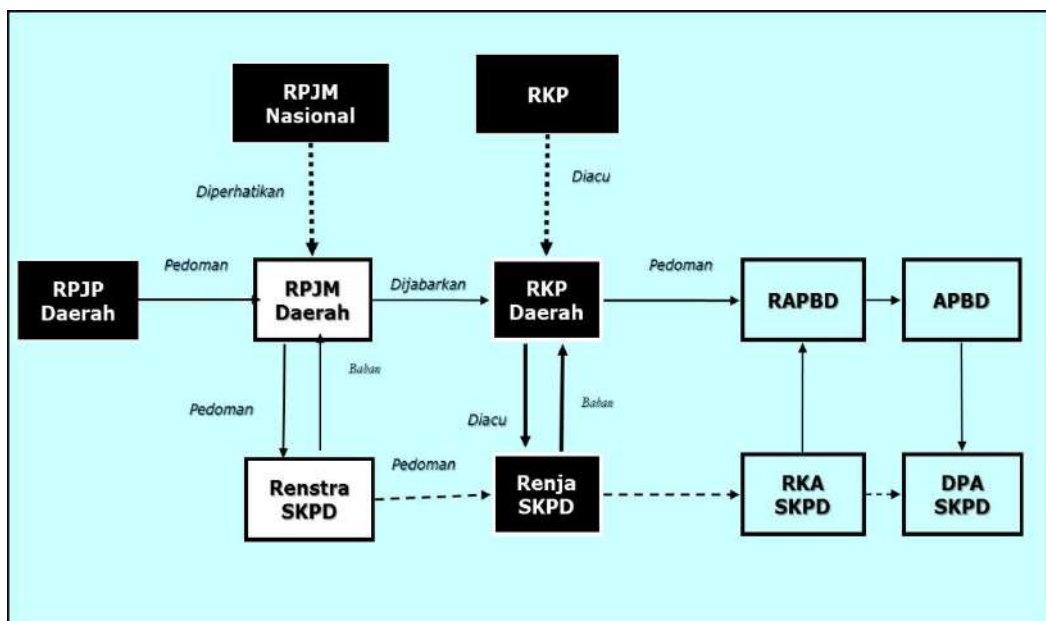
Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan yang terbagi dalam tiga fase, yakni Renja Awal Perangkat Daerah, Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Awal Perangkat Daerah merupakan bahan awal untuk pembahasan dalam musrenbang tingkat Perangkat Daerah sebagai upaya perencanaan partisipatif dengan pendekatan *bottom up* dan *top down* proses dimana partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait sangat diperlukan guna menetapkan Rancangan akhir Renja menjadi Renja definitif Perangkat Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKPD Kota Pekalongan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2026 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan OPD terkait di Kota Pekalongan. Hasil rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tersebut nantinya dapat di kompilasikan dengan Rencana kerja Perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Gambar
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2026 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2026;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026;
14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026. Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 21 tanggal 4 Juli 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Dokumen Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan disusun bertujuan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 sesuai dengan Perwal RKPD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU, pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, serta formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, diuraikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk lebih memaksimalkan perencanaan pembangunan tahun 2026 maka diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2024) dan Tahun Berjalan (2025) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disajikan tabel 2.1 sebagaimana berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan pencapaian renja s/d th 2024 (n-2) Serta Perkiraan Realisasi Tahun 2025

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2024	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024	Target 2024	Perkiraan Capaian 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100,01	100	100	100,01	100,01	Tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Persen	100	100	100	100	102,95	100	100	102,95	102,95	Tercapai

	urusan pemerintah daerah											
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
1.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	108,86	100	100	108,86	108,86	Tercapai
5.	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6.	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
ii.	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7.	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

III.	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Lembaga	16	16	16	16	16	16	16	16	100	Tercapai
8.	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
IV.	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9.	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
V.	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tertang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
10.	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
VI.	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11.	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa semua target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pekalongan, baik target tahunan maupun target RPJMD telah tercapai/100%, hal tersebut dikarenakan faktor - faktor sebagaimana berikut :

1. Adanya Visi dan misi yang kuat dan jelas yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Badan Kesbangpol, hal Ini membantu menyelaraskan upaya dan memastikan semua orang pegawai menuju tujuan yang sama.
2. Adanya pemimpin yang efektif dari Plt. Badan Kesbangpol yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan membimbing tim dan pegawai untuk mencapai target kinerja sehingga para pegawai mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengelola perubahan dengan baik.
3. Proses kerja yang terstruktur dan sistem yang efektif membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, hal ini meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas pekerjaan.
4. Para pegawai yang berkomitmen tinggi, berdedikasi dalam mencapai tujuan organisasi, komitmen ini dibangun melalui budaya organisasi yang positif dan lingkungan kerja yang mendukung.
5. Adanya evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, evaluasi ini membantu dalam membuat perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
6. Dukungan dari Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
7. Hubungan yang baik dengan stakeholder terkait, seperti Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kemenag, BNN, BIN, KPU, Bawaslu, Parpol dan Organisasi Masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Dari tercapainya target kinerja tahun 2024 dan Target RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan salah satu implikasinya adalah dapat terwujudnya Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan, hal itu bisa kita lihat dari amannya penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPRD serta Pemilukada Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan tercapainya target kinerja di atas maka, Badan Kesatuan dan politik Kota Pekalongan mengambil kebijakan perencanaan tahun yang akan datang

difokuskan pada sub kegiatan penting terutama pada kinerja utama Badan Kesbangpol, diantaranya adalah :

1. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

Kesbangpol bertugas membina pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta memperkuat wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah dengan pembinaan Paskibraka dan purna Paskibraka Kota Pekalongan.

2. Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Demokrasi:

Kesbangpol memfasilitasi proses politik dalam negeri, termasuk pelaksanaan Pemilu, serta menjaga iklim demokrasi yang sehat.

3. Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya:

Kesbangpol berupaya menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

4. Pembinaan Kerukunan:

Kesbangpol berperan penting dalam menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan lainnya.

5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan:

Kesbangpol melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pembangunan daerah.

6. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:

Kesbangpol memiliki tugas penting dalam menjaga kewaspadaan nasional dan melakukan penanganan dini terhadap potensi konflik sosial.

7. Koordinasi, Evaluasi, dan Pelaporan:

Kesbangpol melakukan koordinasi antarinstansi terkait, melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban

Sedangkan untuk penganggaran di tahun - tahun yang akan datang mengingat adanya efisiensi anggaran dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang sangat tinggi, utamanya dalam hal pengelolaan sampah, maka badan Kesbangpol tidak mengajukan peningkatan anggaran.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan Capaian Kinerja Pelayanan sesuai dengan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Indikator Kinerja yang akan dimuat berdasarkan tugas dan

fungsi instansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian pelayanan.

Kinerja Badan Kesbangpol Kota Pekalongan diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Bakesbangpol Kota Pekalongan. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran atas pencapaian kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	% Capaian	Kategori
Meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100%	100%	100%	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%	Sangat Baik

Keterangan : *Realisasi menggunakan realisasi tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui, Target dengan capaian realiasi 100% yaitu dengan Indikator sasaran Potensi Konflik Sosial Teratasi, hal ini menunjukkan capaian sangat Baik.

Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial di Kota Pekalongan dapat tercapai karena beberapa hal, antara lain :

1. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat, hal ini ditandai dengan :
 - a. Masyarakat Kota Pekalongan semakin menyadari dampak negatif konflik sosial terhadap stabilitas dan kesejahteraan bersama.
 - b. Adanya peningkatan pemahaman tentang pentingnya menjaga kerukunan, toleransi, dan saling menghormati perbedaan.
 - c. Munculnya gerakan sosial dan komunitas yang aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.
2. Perkembangan Teknologi:

- a. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan penting dalam deteksi dini potensi konflik melalui pemantauan media sosial, laporan warga, dan analisis data.
 - b. Pemanfaatan teknologi memungkinkan informasi mengenai potensi konflik dapat tersebar lebih cepat dan luas, sehingga memungkinkan intervensi lebih awal.
3. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait:
- a. Pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam hal ini melalui Badan Kesbangpol Kota Pekalongan semakin fokus pada upaya pencegahan dan penanganan konflik melalui kebijakan yang komprehensif.
 - b. Pengembangan sistem deteksi dini konflik dan mekanisme penanganan yang melibatkan berbagai pihak terkait.
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani konflik sosial.
4. Penerapan Pendekatan yang Beragam:
- a. Penerapan berbagai pendekatan dalam pengelolaan konflik, seperti mediasi, negosiasi, dan pendekatan partisipatif, semakin meluas.
 - b. Pemanfaatan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik juga menjadi perhatian.
 - c. Pengembangan kapasitas individu dan kelompok dalam menghadapi konflik juga semakin ditingkatkan.
5. Meningkatnya kesadaran akan dampak konflik sosial di masyarakat Kota Pekalongan :
- a. Masyarakat semakin menyadari dampak negatif konflik terhadap stabilitas keamanan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
 - b. Hal ini mendorong upaya kolektif untuk mencegah dan mengatasi konflik sebelum eskalasi lebih lanjut.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan

tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Pekalongan pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a) Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b) Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
 - c) Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
 - d) Meningkatnya gangguan kamtibmas terutama terhadap narapidana yang mendapat asimilasi.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a) Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - b) Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - c) Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
 - d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
 - a) Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b) Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
 - c) Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;

Kemudian isu - isu penting tersebut apabila dihubungkan dengan visi dan misi kepala daerah yang terkait dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Pekalongan dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka akan berpengaruh pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri daerah (wawasan kebangsaan, nasionalisme, partisipatif masyarakat dalam pembangunan), pengembangan pemahaman politik melalui budaya politik demokratis yang santun dan mengedepankan supremasi hukum (pendidikan politik masyarakat dan pembinaan partai politik), pengembangan penanganan atas penyandang masalah kesejahteraan sosial (penanganan konflik sosial, dan kesenjangan sosial), pemenuhan kebutuhan dasar (keamanan dan ketertiban).

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan pelayanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dan sistem manajemen.

Analisis Pilihan Strategi SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dalam pencapaian target kinerja. Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam Analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu Sumber Daya, Keterampilan/Kemampuan, atau Keuntungan. Sedangkan kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya. Peluang merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan ancaman

dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan terhadap posisi organisasi.

Kekuatan		Kelemahan	
S1	Peran Utama Lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa	W1	SDM yang kurang terampil dan cakap
S2	Etos Kerja dan Motivasi yang cukup tinggi	W2	Fasilitas Pendukung kerja yang kurang memadai
Peluang		Tantangan	
O1	Dukungan Penuh dari jajaran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	T1	Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan
O2	Adanya Kesempatan untuk Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur	T2	Bertambahnya ruang lingkup tugas yang ditangani

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, bahwa ada beberapa faktor yang timbul yaitu:

1. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan mitra kerja
- Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur di antaranya diklat.

b. Tantangan

- Perkembangan teknologi pelayanan
- Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan
- Bertambahnya ruang lingkup tugas yang ditangani

2. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Peran Utama Lembaga yang sangat strategis dalam Pengembangan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Etos Kerja dan Motivasi yang cukup tinggi
- Struktur Organisasi
- SOP yang lengkap dan rinci
- Program Kerja yang tepat sasaran
- TPP sebagai motivasi kinerja yang dikaitkan dengan penilaian kinerja

b. Kelemahan

- Kualitas kompetensi dan kualitas SDM yang kurang terampil
- Fasilitas Pendukung yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Diperlukannya Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Diperlukannya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4. Diperlukannya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 5. Diperlukannya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 6. Diperlukannya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yakni membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Data tersebut disajikan dalam Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (terlampir).

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka Menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Demi mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yakni Terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius. Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan (RPJMD) Tahun 2021-2026. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD.

Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Pada Musrenbang Kota, ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, dan kelompok masyarakat langsung Kota Pekalongan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2026 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai bahkan disinyalir telah ada produsen narkoba di Indonesia.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas Dari kebijakan nasional tersebut, Badan

Kesbangpol Kota Pekalongan tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2026 antara lain :

- a) Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS.
- b) Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
- c) Pelaksanaan Perda P4GN, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN
- d) Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas.
- e) Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Kota Pekalongan.
- f) Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama.
- g) Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam kurun tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :
" Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik".

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sara di Masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Harmonisasi dan Kerukunan Masyarakat	a. Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sara di Masyarakat.	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Persentase Konflik SARA yang terselesaikan	Indeks Persen	6,50 100

III.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2026 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2026. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 29 subkegiatan. Adapun tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2, yaitu sebagaimana terlampir.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan yang akan dilaksanakan dalam 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan pada tahun 2026 tersebut beserta indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatifnya dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	7	9	10	11
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100%	2.873.784.000
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	14.779.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.631.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.148.000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.390.713.000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.353.774.000
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	35.875.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.064.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	5.000.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000.000

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	129.319.000
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.500.000
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.189.000
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.650.000
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.500.000
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.060.000
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.080.000
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	59.340.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	267.360.000
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	730.000
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.900.000
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.730.000,
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	66.613.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	48.924.000
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.939.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	7.750.000
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100%	1.518.386.000
7.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100%	1.518.386.000
7.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190 orang	19.560.000
7.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	1340 Orang	233.900.000

		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
7.3	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	731.340.000
7.4	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	533.586.000
III.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase anggota Partai Politik dan siswa lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang meningkat pemahamannya atas etika dan budaya politik	100%	1.187.320.000
8.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100%	1.187.320.000
8.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	830.980.000
8.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180 Orang	356.340.000
IV.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100%	258.000.000
9.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	258.000.000
9.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	258.000.000
V.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang	100%	98.197.000

		ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
10.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	98.197.000
10.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	98.197.000
VI.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100%	288.930.000
11.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	288.930.000
11.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	288.930.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengantuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan padamasyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dalam penyusunan Renja tahun 2026 ini terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

1. Dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Pekalongan telah melibatkan berbagai pihak dan stakeholder terkait, seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain. Keterlibatan ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait.
2. Renja harus didukung dengan anggaran yang cukup. Kekurangan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kota Pekalongan akan selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.
4. Renja Badan Kesbangpol Kota Pekalongan ini akan dipublikasikan secara terbuka melalui laman website Badan Kesbangpol Kota Pekalongan dan PPID Kota

Pekalongan, agar masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Pekalongan tahun 2026 ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Hal ini meliputi beberapa aspek penting, seperti penyusunan rencana yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan kegiatan yang efektif serta efisien. Selain itu, Renja ini juga memperhatikan aspek - aspek khusus dari Badan Kesbangpol yakni :

1. Peningkatan Kewaspadaan Nasional

Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, termasuk peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

2. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Badan Kesbangpol juga bertugas memberdayakan organisasi kemasyarakatan agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

3. Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik

Badan Kesbangpol perlu menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Renja Tahun 2026. Sehingga diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan bersama seluruh stakeholder yang ada perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Rencana tindak lanjut dari Renja badan Kesbangpol Kota Pekalongan tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan Rincian Kegiatan:

Rencana tindak lanjut mencakup penjabaran lebih detail dari program dan kegiatan yang ada dalam Renja, termasuk alokasi waktu, sumber daya yang dibutuhkan, dan pihak yang bertanggung jawab.

2. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan:

Jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Penetapan Indikator Kinerja:

Indikator kinerja yang spesifik dan terukur akan membantu dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Renja, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

4. Pengalokasian Anggaran:

Rencana tindak lanjut juga mencakup rincian alokasi anggaran untuk setiap kegiatan, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Renja.

5. Penyusunan Tim Pelaksana:

Tim pelaksana yang kompeten dan bertanggung jawab akan dibentuk untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.

6. Monitoring dan Evaluasi:

Sistem monitoring dan evaluasi yang berkala akan dilakukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan Renja, mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul, dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

7. Pelaporan:

Pelaporan yang teratur dan transparan akan dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Renja kepada pihak-pihak terkait, termasuk pimpinan dan masyarakat.

Dengan adanya rencana tindak lanjut yang jelas dan terperinci, Renja Kesbangpol Kota Pekalongan Tahun 2026 diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan

terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2026.

Pekalongan, 4 Agustus 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan



M. CAUFIYU ROCHMAN, S.STP., M.M
NIP. 19780107 199703 1 002

Tabel 2.3.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	3.242.845.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100%	2.873.784.000	
		Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
		Kota Pekalongan	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%			Kota Pekalongan	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	14.779.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	14.779.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.759.774.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.390.713.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	5.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	129.319.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	129.319.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	267.360.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	267.360.000	

6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	66.613.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	66.613.000	
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kota Pekalongan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100%	882.666.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kota Pekalongan	persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100%	1.518.386.000	
7.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pekalongan	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100%	882.666.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pekalongan	Persentase pemantapan pelaksanaan pembinaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	1.518.386.000	
III.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Pekalongan	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	889.400.000	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Pekalongan	Persentase anggota Partai Politik dan siswa lembaga pendidikan di Kota Pekalongan yang meningkat pemahamannya atas etika dan budaya politik	100%	1.187.320.000	
8.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100%	889.400.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100%	1.187.320.000	

IV.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100%	218.000.000	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100%	258.000.000	
9.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	218.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	258.000.000	
V.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kota Pekalongan	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	97.837.000	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kota Pekalongan	Persentase masyarakat yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	98.197.000	
10.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	97.837.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pekalongan	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	98.197.000	
VI.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kota Pekalongan	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100%	288.930.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kota Pekalongan	Persentase konflik sosial yang tertangani	100%	288.930.000	
11.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	288.930.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	288.930.000	

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan pagu indikatif dikarenakan pengurangan/penyesuaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp. 2.759.774.000 menjadi Rp. 2.390.713.000, hal ini dikarenakan penyesuaian perhitungan gaji dan tunjangan ASN yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2026.

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan mengalami kenaikan pagu indikatif dari pagu awal yang semula Rp. 882.666.000 menjadi Rp. 1.518.386.000, naik sebesar Rp. 635.720.000. kenaikan tersebut adalah karena adanya kegiatan pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan dan Visi Misi Walikota dan wakil Walikota Pekalongan dan penyesuaian tunjangan jaminan kesehatan bagi Tenaga Kegiatan.

Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mengalami kenaikan pagu indikatif dari pagu awal yang semula Rp. 889.400.000 menjadi Rp. 1.187.320.000, naik sebesar Rp. 297.920.000. kenaikan tersebut adalah karena adanya kegiatan pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan dan penyesuaian tunjangan jaminan kesehatan bagi Tenaga Kegiatan.

Pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mengalami kenaikan pagu indikatif dari pagu awal yang semula Rp. 218.000.000 menjadi Rp. 258.000.000, naik sebesar Rp. 40.000.000. Kenaikan tersebut adalah karena adanya penambahan anggaran untuk hibah keuangan bagi Organisasi Masyarakat Kota Pekalongan.

Tabel 3.2

Rumusan Program Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Kesbangpol Kota Pekalongan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	8	9	10	11	15	16
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		6.224.617.000,00					4.020.117.000,00
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		6.224.617.000,00					4.020.117.000,00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		6.224.617.000,00					4.020.117.000,00
1	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	2.873.784.000,00			100 persen	1.964.829.000,00
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	14.779.000,00			100persen	10.912.000,00
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.631.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	2.500.000,00
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.148.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.500.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	12.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	6.912.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.390.713.000,00			100persen	1.748.274.000,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	2.353.774.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang/bulan	1.713.774.000,00
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	35.875.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	33.000.000,00
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1.064.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000,00			100persen	9.500.000,00

8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	9.500.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	129.319.000,00			100persen	94.413.000,00
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	3.500.000,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	39.189.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	30.000.000,00
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1.650.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	4.000.000,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	18.500.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	19.000.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	6.060.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	8.300.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	1.080.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	59.340.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Laporan	27.113.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	267.360.000,00			100persen	61.561.000,00
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	730.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	1.000.000,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	57.900.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	29.600.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	208.730.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	30.961.000,00
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	66.613.000,00			100persen	40.169.000,00
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	48.924.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	24.669.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	9.939.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	8.000.000,00
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	7.750.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	7.500.000,00
2	8	01	02		PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen	1.518.386.000,00			100 persen	755.688.000,00
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen	1.518.386.000,00			100persen	755.688.000,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190 Orang	19.560.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	190 Orang	26.792.000,00
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1340 Orang	233.900.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1340 Orang	142.056.000,00
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,							

						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	731.340.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Keluarga	95.340.000,00
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka							
						Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	533.586.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	491.500.000,00
3	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen	1.187.320.000,00			100 persen	859.496.000,00
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen 100 persen	1.187.320.000,00			100persen	859.496.000,00
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	830.980.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Orang	774.700.000,00
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum							

						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180 Orang	356.340.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	180 Orang	84.796.000,00
4	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100,00 persen 100 persen	258.000.000,00			100.00persen	136.399.000,00
	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen	258.000.000,00			100persen	136.399.000,00
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	258.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Orang	136.399.000,00
5	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00 persen 100 persen	98.197.000,00			100.00persen	212.054.000,00
	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	98.197.000,00			100persen	212.054.000,00
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						

						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	98.197.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250 Orang	212.054.000,00
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial 100,00 persen 100 persen	288.930.000,00			0.00kali	91.651.000,00
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	288.930.000,00			100persen	91.651.000,00
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	288.930.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Orang	91.651.000,00
							J U M L A H	6.224.617.000,00				4.020.117.000,00